

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan ini disusun berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dengan menyoroti sejauh mana kebijakan SPM telah diterapkan serta faktor- faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian dan tantangan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh peserta didik, terutama mereka yang berasal dari kelompok kurang mampu.

1.Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan bagi Peserta Didik Kurang Mampu di Kabupaten Blora

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Blora menunjukkan adanya variasi dalam penerapan kebijakan di setiap sekolah. Meskipun regulasi yang digunakan sebagai pedoman bersifat seragam, realisasi di lapangan mengalami adaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Beberapa sekolah lebih berfokus pada optimalisasi sarana dan prasarana, sementara yang lain menitikberatkan pada peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan bantuan bagi peserta didik kurang mampu. Secara umum, upaya pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu telah dilakukan melalui berbagai bentuk bantuan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta kebijakan lokal berupa pembebasan biaya seragam dan fasilitas

pendukung lainnya. Namun, pelaksanaan bantuan tersebut masih menghadapi kendala teknis, terutama terkait dengan mekanisme penyaluran yang mengharuskan peserta didik terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Beberapa siswa kurang mampu yang tidak terdaftar dalam DTKS mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan, sehingga sekolah harus berupaya membantu dalam pendampingan administratif agar mereka tetap dapat mengakses program pendidikan yang tersedia.

Sosialisasi mengenai kebijakan SPM kepada orang tua dan masyarakat telah dilakukan melalui pertemuan rutin, media sosial, serta peran aktif komite sekolah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak pendidikan anak mereka. Namun, masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang kurang efektif, terutama dalam menjelaskan prosedur administratif pengajuan bantuan pendidikan. Hal ini menyebabkan beberapa orang tua masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengakses bantuan yang disediakan. Ketersediaan tenaga pendidik di Kabupaten Blora secara umum telah mencukupi kebutuhan dasar pendidikan, tetapi masih terdapat kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu, terutama di daerah terpencil.

keterbatasan tenaga kependidikan seperti staf administrasi dan petugas keamanan menyebabkan beban kerja guru menjadi lebih tinggi karena harus merangkap tugas administratif. Untuk mengatasi hal ini, beberapa sekolah melakukan pemindahan guru dari sekolah lain atau memberikan tugas tambahan bagi tenaga pendidik yang tersedia. Di sisi lain, pelatihan bagi

tenaga pendidik masih mengalami ketimpangan, di mana sekolah dengan lebih banyak guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) cenderung lebih siap dalam mengimplementasikan kebijakan dibandingkan dengan sekolah yang didominasi oleh tenaga honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akses terhadap pelatihan agar seluruh tenaga pendidik memiliki pemahaman yang seragam mengenai implementasi kebijakan pendidikan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan bagi Peserta Didik Kurang Mampu di Kabupaten Blora

Faktor Pendukung

Salah satu faktor utama yang mendukung implementasi SPM di Kabupaten Blora adalah kejelasan kebijakan dan regulasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan di tingkat daerah dan sekolah. Kebijakan ini memberikan arahan yang jelas bagi Dinas Pendidikan, sekolah, serta tenaga pendidik dalam memastikan bahwa setiap peserta didik, terutama dari keluarga kurang mampu, memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya regulasi yang jelas, pihak sekolah memiliki acuan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Dukungan dari pemerintah daerah melalui berbagai program pendidikan juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Program seperti "Blora Pintar" dan pemantauan melalui Rapor Pendidikan bertujuan untuk

meningkatkan fasilitas sekolah serta memberikan bantuan kepada peserta didik yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan, seperti seragam sekolah dan Program Indonesia Pintar (PIP), yang sangat membantu dalam mengurangi beban ekonomi keluarga peserta didik kurang mampu. Bantuan ini memungkinkan siswa untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka tanpa harus terlalu terbebani oleh biaya sekolah.

Upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi SPM. Beberapa sekolah telah mendapatkan program pelatihan dan pendampingan bagi guru agar mereka dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip SPM dalam proses pembelajaran. Peningkatan kompetensi guru ini sangat penting agar peserta didik dari keluarga kurang mampu mendapatkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain dukungan dari pemerintah, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga mengalami peningkatan di beberapa wilayah. Program bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah telah membantu mengubah pola pikir orang tua mengenai pendidikan anak-anak mereka. Jika sebelumnya pendidikan dianggap sebagai beban ekonomi, kini semakin banyak orang tua yang memahami bahwa pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan anak-anak mereka.

Faktor Penghambat

Meskipun berbagai faktor pendukung telah membantu implementasi

SPM, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama adalah variabilitas dalam penerapan kebijakan di tingkat sekolah. Meskipun kebijakan SPM telah ditetapkan secara nasional, pelaksanaannya di masing-masing sekolah tidak selalu seragam. Beberapa sekolah lebih berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana, sementara sekolah lainnya lebih menitikberatkan pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik atau bantuan bagi peserta didik kurang mampu. Perbedaan prioritas ini menyebabkan ketimpangan dalam implementasi SPM di berbagai sekolah.

Keterbatasan sumber daya pendidikan menjadi tantangan yang cukup signifikan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kekurangan tenaga pendidik, terutama di daerah terpencil. Beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan guru untuk mata pelajaran tertentu, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Selain tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam implementasi SPM. Masih terdapat sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, serta akses terhadap teknologi pendidikan. Hal ini tentunya berpengaruh pada efektivitas pembelajaran di sekolah.

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SPM. Meskipun pemerintah daerah telah berusaha menyalurkan bantuan pendidikan dan meningkatkan fasilitas sekolah, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini masih bergantung pada sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Salah satu kendala yang sering

ditemui adalah kurangnya pengawasan terhadap distribusi bantuan, sehingga masih ada peserta didik dari keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan manfaat secara optimal.

Faktor sosial-ekonomi masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam implementasi SPM. Kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan masih bervariasi, terutama di daerah pelosok, di mana masih ada pandangan bahwa pendidikan merupakan beban ekonomi. Beberapa orang tua lebih memprioritaskan anak-anak mereka untuk membantu pekerjaan keluarga dibandingkan melanjutkan sekolah. Kurangnya informasi mengenai hak pendidikan anak juga menyebabkan rendahnya partisipasi orang tua dalam mencari tahu dan memanfaatkan program bantuan pendidikan yang tersedia.

Aksesibilitas geografis juga menjadi kendala dalam pelaksanaan SPM di Kabupaten Blora. Siswa di daerah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, sementara siswa di daerah pelosok masih menghadapi hambatan dalam hal transportasi dan infrastruktur. Beberapa sekolah di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas dasar yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar, sehingga peserta didik di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih terbatas dibandingkan siswa di perkotaan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Blora masih

menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik kurang mampu. Meskipun kebijakan telah diterapkan dengan berbagai program bantuan, masih terdapat kendala dalam distribusi bantuan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pemahaman masyarakat terhadap hak pendidikan yang dapat diakses. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan penguatan agar pelaksanaan SPM dapat berjalan lebih optimal dan merata. Adapun saran yang diajukan mencakup dua aspek utama, yaitu penguatan implementasi SPM serta peningkatan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan :

1. Implementasi SPM bidang pendidikan di Kabupaten Blora perlu diperkuat dengan langkah- langkah strategis untuk memastikan seluruh peserta didik, terutama dari keluarga kurang mampu, dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan harus mengoptimalkan sosialisasi kebijakan SPM kepada pihak sekolah, tenaga pendidik, serta masyarakat agar pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam layanan pendidikan semakin merata. Selain itu, mekanisme pendataan peserta didik kurang mampu harus diperbarui secara berkala dengan meningkatkan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini bertujuan agar program bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat diberikan secara tepat sasaran tanpa ada siswa yang terlewat akibat kendala administratif. Sekolah juga perlu mengambil peran lebih aktif dalam memberikan pendampingan administratif bagi peserta didik kurang mampu agar mereka dapat memperoleh manfaat dari program bantuan yang tersedia. Proses pengajuan dan pencairan bantuan harus

dibuat lebih sederhana dan transparan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi orang tua maupun siswa yang membutuhkan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkala, terutama bagi guru honorer dan tenaga pendidik di daerah pelosok, agar pemahaman mereka terhadap kebijakan SPM semakin merata. Dengan adanya penguatan implementasi SPM yang terstruktur dan sistematis, diharapkan seluruh peserta didik dapat menikmati layanan pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Keberhasilan implementasi SPM bidang pendidikan sangat bergantung pada faktor pendukung, seperti sarana dan prasarana, tenaga pendidik, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu memastikan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses terhadap teknologi. Bantuan pengadaan fasilitas pendidikan harus disalurkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah agar seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang kondusif. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan transportasi bagi peserta didik di wilayah terpencil guna mengurangi hambatan aksesibilitas menuju sekolah. Selain sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pendidik juga menjadi faktor krusial dalam implementasi SPM pendidikan. Pemerintah perlu menambah jumlah guru, terutama di mata pelajaran tertentu yang masih mengalami kekurangan tenaga pengajar. Insentif khusus bagi guru yang bersedia mengajar di daerah

terpencil dapat menjadi solusi untuk menarik tenaga pendidik yang berkualitas agar bersedia mengabdikan diri di wilayah tersebut. Di samping itu, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, sekolah, serta masyarakat harus terus dilakukan agar implementasi SPM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi yang baik antar pihak terkait, kebijakan pendidikan yang telah dirancang dapat lebih optimal dalam memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.